

PERNIKAHAN DINI, PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN KEMISKINAN DI INDONESIA, MASIHKAH BERKORELASI?

Ahmad Juhaidi; Masyithah Umar

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
ahmadjuhaidi@uin-antasari.ac.id; masyithah.umar55@gmail.com

Abstract: *The percentage of early marriages in South Kalimantan is the highest in Indonesia but the poverty rate in this province is the third lowest. This gives an early indication that early marriages in the province are not associated with poverty. Therefore, the case of early marriages in South Kalimantan is interesting to be observed. This study investigates what are the causes of early marriages in South Kalimantan and whether early marriages have a correlation with poverty and other indicators such as education and health levels. To answer that, data collection is done by documentation of interviews transcript and data report from the Central Statistics Agency of South Kalimantan. This study finds that the causes of early marriages in South Kalimantan relate to economic problems and as a way to protect families. This study also finds that there is a significant negative correlation between early marriages and the level of education ($-0,005 < 0,05$) and between early marriages and health ($-0,001 < 0,05$). Surprisingly, there is no significant correlation between early marriages and poverty ($0,073 > 0,05$). This means that the higher the number of early marriages, the lower the level of education and health and vice versa. This finding is important for policy makers, communities, and religious leaders to focus on supporting public education to prevent early marriages and break the cycle of problems associated with early marriages.*

Keywords: *Early Marriage; Education; Health; Poverty*

Abstrak: *Persentase pernikahan dini di Kalimantan Selatan tertinggi di Indonesia tetapi angka kemiskinan di Provinsi ini berada posisi tiga terendah. Hal tersebut memberi petunjuk awal bahwa pernikahan dini di provinsi ini tidak berhubungan dengan kemiskinan. Oleh karena itu, kasus pernikahan dini di Kalimantan Selatan menarik untuk dicermati. Penelitian ini mencari penyebab terjadinya pernikahan dini di Kalimantan Selatan dan korelasi antara pernikahan dini dengan tingkat pendidikan, kesehatan, dan kemiskinan. Untuk menjawab itu pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi transkrip wawancara dan laporan data dari Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan. Penelitian ini menemukan bahwa penyebab terjadinya pernikahan dini di Kalimantan Selatan adalah permasalahan ekonomi dan sebagai cara untuk melindungi keluarga. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa pernikahan dini berkorelasi signifikan dengan tingkat pendidikan ($-0,005 < 0,05$) dan kesehatan ($-0,001 < 0,05$) dengan nilai negatif, tetapi pernikahan dini tidak berkorelasi signifikan dengan kemiskinan ($0,073 > 0,05$). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jika persentase pernikahan dini menurun, tingkat pendidikan dan angka harapan hidup akan meningkat. Temuan ini penting untuk pengambil kebijakan, komunitas, serta tokoh agama untuk fokus pada dukungan terhadap pendidikan masyarakat untuk mencegah pernikahan dini dan memutus siklus permasalahan yang terkait dengan pernikahan dini.*

Kata kunci: *Pernikahan Dini; Pendidikan; Kesehatan; Kemiskinan*

Pendahuluan

Pernikahan dini (*early marriage*) sangat menarik untuk dikaji karena hal itu berhubungan dan berdampak panjang bagi keluarga tersebut. UNICEF membatasi pernikahan dini atau pernikahan anak-anak adalah pernikahan dibawah usia 19 tahun.¹ Penelitian-penelitian menunjukkan bukti empirik bahwa pernikahan dini akan berdampak negatif bagi keturunan dan ibu. Goli et.all (2015), misalnya, menjelaskan bahwa pernikahan dini akan menyebabkan kehamilan di usia muda dan berdampak bagi kesehatan bayi dan ibu, bahkan bisa berdampak pada kematian.² Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pernikahan dini tidak hanya berdampak bagi ibu, tetapi juga bagi keturunan. Oleh karena itulah, UNICEF memasukkan pernikahan dini sebagai salah satu bagian tujuan 3 UNICEF: *Every Child is Protected from Violence and Exploitation*.³

Selain dampak negatif tersebut, perspektif hukum Islam memberi pandangan yang mencerminkan kebolehan pernikahan dini. Pernikahan dini dibolehkan untuk kemashlahatan. Pada mulanya hukum menikah adalah sunnah sesuai dengan Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 3: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya." Akan tetapi, pada kondisi seseorang tidak dapat menjaga kesucian, hukum asal sunnah ini dapat berubah menjadi wajib.⁴ Tulisan Rifiani (2011) tersebut menunjukkan bahwa menikah dini sebenarnya tidak dilarang oleh hukum Islam dengan syarat-syarat tertentu.

Pandangan hukum keluarga Islam tersebut sekilas memunculkan paradoks. Satu sisi, menurut tinjauan kesehatan, pernikahan dini akan berdampak negatif, tetapi pada sisi lain, menurut hukum keluarga Islam tidak ada larangan yang tegas untuk menikah dini. Paradoks itu, menurut kami, menjadi salah satu sebab mengapa pernikahan dini masih sering terjadi, terutama pada daerah-daerah tertinggal. Bahkan, pada daerah-daerah tertentu ada dikenal frase "*baik balu, daripada kada payu* (lebih baik menjadi janda, daripada tidak menikah)". Frase itu menunjukkan bahwa seorang gadis lebih baik cepat menikah, meskipun nanti akan bercerai dan menjadi janda, daripada tidak menikah dan menjadi perawan tua.

Jika ditelaah lebih jauh, riset tentang pernikahan dini lebih cenderung untuk mencari bukti empirik dampak negatif pernikahan dini, terutama riset-riset dari sudut pandang kesehatan dan jender. Pada sisi lain, pernikahan dini tidak selalu akan berdampak negatif. Riset Hajihasani dan Sim (2019) menunjukkan bukti bahwa

¹UNICEF, UNICEF Annual Report 2018 (New York: UNICEF, 2019), 31.

²Srinivas Goli, Anu Rammohan, and Deepti Singh, "The Effect of Early Marriages and Early Childbearing on Women's Nutritional Status in India," *Maternal and Child Health Journal* 19, no. 8 (August 2015): 1864, <https://doi.org/10.1007/s10995-015-1700-7>.

³UNICEF, UNICEF Annual Report 2018, 27.

⁴Dwi Rifiani, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam," *Journal de Jure* 3, no. 2 (December 1, 2011): 130, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v3i2.2144>.

marital satisfaction atau kepuasan dalam perkawinan berhubungan dengan kecerdasan emosional. Pasangan yang memiliki kecerdasan emosional: *empathy*, kemampuan mengontrol emosi dan lainnya, memiliki korelasi dengan kepuasan dalam perkawinan (*marital satisfaction*). Kepuasan perkawinan merupakan dampak dari tingkat pendidikan, kelas sosial ekonomi, cinta, komitmen, komunikasi dalam perkawinan, konflik, gender, keberadaan anak, relasi seksual, dan pembagian tugas.⁵ Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pernikahan dini tidak serta merta akan berdampak negatif bagi keluarga.

Terkait dengan usia ideal dan penyebab pernikahan dini, menurut Kasubdit Ketahanan Remaja (Hanrem) BKKBN Provinsi Lampung Hermina SH, MAH, Apsari, usia ideal menikah adalah 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki, diungkapnya, faktor penyebab pernikahan dini diantaranya pendidikan rendah, kebutuhan ekonomi, kultur nikah muda, pernikahan yang diatur, seks bebas pada remaja, dan kehamilan di luar nikah. Pernikahan dini memiliki beberapa resiko seperti peluang kematian ibu tinggi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hak kesehatan reproduksi rendah, sub ordinasi keluarga, *drop out* dari pendidikan dan lainnya.⁶

Istilah pernikahan dini (*early marriage*) menurut UNICEF adalah pernikahan yang dilakukan dibawah usia 19 tahun.⁷ UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 membatasi bahwa perkawinan dapat dilaksanakan apabila usia pria paling rendah 19 tahun dan usia perempuan 16 tahun. Perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut dapat disebut sebagai pernikahan dini. Pernikahan dini, kadang tidak dapat dengan tegas didefinisikan. Tulisan Rahman *et al* (2015) misalnya, tidak jelas menyebut definisi, bahkan memunculkan pertentangan dalam tulisan itu sendiri. Mereka menyebut bahwa pernikahan dini adalah apabila pernikahan dilakukan dibawah usia 19 tahun untuk lelaki dan 16 tahun untuk perempuan dengan merujuk pada UU Perkawinan. Akan tetapi, mereka menulis di artikel yang sama juga menyebut pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan dibawah 20 tahun dan mereka lebih cenderung mengikuti pendapat ini tanpa argumen yang jelas dan kuat.⁸ Artikel kami ini lebih sependapat dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu perkawinan pada usia perempuan dibawah 16 tahun. Hal itu berhubungan pula dengan data Badan Pusat Statistik usia perkawinan yang mengklasifikan umur perkawinan pertama perempuan dari dibawah 16 tahun. Jika

⁵Mehrdad Hajihassani and Timothy Sim, "Marital Satisfaction among Girls with Early Marriage in Iran: Emotional Intelligence and Religious Orientation," *International Journal of Adolescence and Youth* 24, no. 3 (July 3, 2019): 298, <https://doi.org/10.1080/02673843.2018.1528167>.

⁶"Stop Pernikahan Dini, Siapkan Generasi Muda Yang Berencana," *IIB Darmajaya* (blog), accessed May 10, 2020, <https://www.darmajaya.ac.id/stop-pernikahan-dini-siapkan-generasi-muda-yang-berencana/>.

⁷UNICEF, UNICEF Annual Report 2018, 31.

⁸Fauzie Rahman et al., "Kajian Budaya Remaja Pelaku Pernikahan Dini Di Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan," *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia* 11, no. 2 (2015): 109, <http://journal.unhas.ac.id/index.php/mkmi/article/view/540>.

merujuk pada UNICEF, jumlah perkawinan dibawah 19 tahun di Kalimantan Selatan akan sangat besar, bahkan bisa mencapai 50%.⁹

Pada tahun 2017, pernikahan dini di Kalimantan Selatan tertinggi se-Indonesia, paling banyak usia 15 – 19 tahun pada kisaran 46% dan usia 10-14 tahun = 9,24%, kata Kabid Adpin BKKBN Provinsi Kalsel Akhmad Zajali pada 27 Juni 2017. Perkawinan anak ini salah satu yang memuat Kalimantan Selatan memiliki indeks pembangunan pemuda terendah di Indonesia 45,83%, sehingga berdampak pada naiknya kehamilan remaja, perkawinan usia anak, dan tingkat kesakitan pemuda. Secara rinci Deputi bidang Tumbuh Kembang Anak (KPPA) Lenny N Rosalin pada tanggal 8 Maret 2019 menyebutkan bahwa angka perkawinan anak 10 – 15 tahun 34,5%, 16 tahun 39,2%, dan 17 tahun 26,3% dari total perkawinan anak. Salah satu faktor penyebab adalah faktor ekonomi dan berada di area rural urban. Kalimantan Selatan adalah masyarakat yang religius dengan mayoritas penduduknya adalah suku Banjar.

Pada tahun 2019, Provinsi Kalimantan Selatan menjadi provinsi dengan jumlah perkawinan anak tertinggi di Indonesia yaitu 39,53 persen (dari jumlah seluruh perkawinan), sementara Daerah Istimewa Yogyakarta terendah dengan 11,07 persen.¹⁰ Jika merujuk pada tingkat kemiskinan di Indonesia, angka pernikahan dini di Kalimantan Selatan tidak berhubungan dengan tingkat ekonomi masyarakat. Kalimantan Selatan termasuk provinsi yang angka kemiskinan paling rendah ke-3, setelah Bali (2) dan DKI Jakarta (1).¹¹ Riset Rahayu dan Wahyuni (2020) menunjukkan bahwa pengeluaran keluarga tidak dipengaruhi oleh pernikahan dini. Menurut mereka, pernikahan dini tidak akan mempengaruhi pengeluaran keluarga mereka per bulan. Dalam riset tersebut, mereka mengukur kemiskinan dengan tingkat pengeluaran per bulan.¹² Fakta empirik itu, dapat dijadikan argumen untuk menolak tulisan Jamilah Reni Ekawati yang menyebut bahwa pernikahan dini dapat menyebabkan kemiskinan struktural.¹³ Riset lain menunjukkan bahwa pernikahan dini berhubungan dengan kemiskinan, pengetahuan orangtua dan anak, mudahnya akses internet, kurang ketatnya pengawasan masyarakat.¹⁴

⁹Badan Pusat Statistik Kalsel BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Selatan 2019 (Banjarmasin: Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan, 2020), 83.

¹⁰Tim, “Kalsel Jadi Provinsi Dengan Jumlah Perkawinan Anak Tertinggi,” nasional, accessed August 14, 2019, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190308201723-20-375681/kalsel-jadi-provinsi-dengan-jumlah-perkawinan-anak-tertinggi>.

¹¹Taufan Adharsyah, “Miris, Tingkat Kemiskinan di 6 Provinsi Ini Meningkat,” news, accessed August 14, 2019, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190715164211-4-85070/miris-tingkat-kemiskinan-di-6-provinsi-ini-meningkat>.

¹²Wulansari Dyah Rahayu and Heni Wahyuni, “The Influence of Early Marriage on Monetary Poverty in Indonesia,” *Journal of Indonesian Economy and Business* 35, no. 1 (2020): 41.

¹³Jamilah Reni Kartikawati, “Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia,” *Jurnal Studi Pemuda* 3, no. 1 (2014): 13.

¹⁴Heri Sunaryanto, “Analisis Sosial-Ekonomi Faktor Penyebab Perkawinan Anak Di Bengkulu: Dalam Perspektif Masyarakat Dan Pemerintah (Studi Kasus Di Kabupaten Seluma),” *Jurnal Sosiologi Nusantara* 5, no. 1 (June 25, 2019): 39, <https://doi.org/10.33369/jsn.5.1.22-42>.

Diskusi tersebut menimbulkan dua hal yang bertentangan, pada satu sisi pernikahan dini dibolehkan dalam hukum Islam, tetapi pada sisi lain dapat menimbulkan dampak negatif pada kesehatan, bahkan kematian anak dan ibu, dan kemiskinan. Jika dilihat secara sekilas dan membandingkannya dengan provinsi lain, fakta empirik di Kalimantan Selatan dapat dijadikan argumen bahwa sebenarnya pernikahan dini tidak akan berdampak pada kemiskinan keluarga. Oleh karena itulah, menarik untuk dibuktikan apakah ada korelasi antara pernikahan dini dengan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan di Kalimantan Selatan. Hal lain yang digali adalah apa penyebab pernikahan dini terjadi di Kalimantan Selatan.

Metode

Penelitian ini adalah penelitian campuran (*mix method*). Data penelitian dikumpulkan melalui dokumentasi transkrip wawancara terhadap pelaku pernikahan dini yang dimuat dalam Rahman *et al* (2015).¹⁵ Dokumentasi juga digunakan untuk mengumpulkan data terkait dengan persentase pernikahan dini, pendidikan yang diukur dari rata-rata lama sekolah, kesehatan yang diukur dari angka harapan hidup, dan kemiskinan yang dilihat dari persentase penduduk miskin di Kalimantan Selatan. Pernikahan dini dalam artikel ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh perempuan berusia di bawah 16 tahun. Data dari transkrip hasil wawancara diolah dengan pendekatan fenomenologi sedangkan data kuantitatif diolah dengan menggunakan SPSS 21 untuk menghitung korelasi pearsons (r) antara variabel pernikahan dini, pendidikan, kesehatan, dan kemiskinan. Nilai signifikansi adalah sebesar 0,05. Korelasi dianggap signifikan apabila apabila nilai signifikansi (2 tailed) < 0,05 .

Pembahasan

Penyebab Pernikahan Dini

Bukti empirik yang kami dapatkan dari transkrip wawancara, hal yang paling menonjol di Kalimantan Selatan sebagai penyebab pernikahan dini, kami kategorikan menjadi dua, yakni: ekonomi keluarga dan memelihara keluarga.

Pertama, ekonomi keluarga. Dalam transkrip wawancara dengan seorang yang menikah dini (pelaku) di daerah Banjarbaru terungkap bahwa dia memang ingin menikah dan menikah agar terpenuhi kebutuhan hidup.¹⁶ Pelaku lain mengaku bahwa menikah untuk meringankan beban orang tua dan dijodohkan keluarga.¹⁷ Dua informan itu paling tidak mengkonfirmasi bahwa ketidakjelasan masa depan ekonomi menjadi faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini.

Kedua, memelihara keluarga. Pada masyarakat Banjar, anak harus dijaga dari tindakan yang akan menimbulkan permasalahan, termasuk yang terkait dengan hubungan lelaki-perempuan. “Saya menikah karena anjuran orang tua yang takut

¹⁵Rahman et al., “Kajian Budaya Remaja Pelaku Pernikahan Dini Di Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan.”

¹⁶M K, Wawancara dengan MK, n.d.

¹⁷M S, Wawancara dengan MS, n.d.

dengan tanggapan orang-orang, yang tidak baik.”¹⁸ Orang tua AR merasa bahwa masyarakat akan menilai tidak baik terhadap keluarga mereka karena AR sudah berpacaran dan diketahui oleh masyarakat sekitar. Hal itu dapat dilihat dari transkrip wawancara berikut “sudah lama berpacaran, kemudian dari ayah menawarkan untuk dilakukan pernikahan agar tidak menjadi bahan pembicaraan orang lain dan memang karena kemauan dari dalam diri sendiri”.¹⁹

Pernyataan yang tidak jauh berbeda dengan pernyataan seorang pegawai pemerintah, yang anaknya dikawinkan setelah lulus SMA/MA, berikut “*daripada anakku bapacaran lebih baik kukawinkan* (daripada anakku berpacaran, lebih kawin)”. Anak pegawai tersebut memang tidak nikah usia dini, tetapi pernyataan itu menggambarkan bahwa pandangan tentang menjaga anak dari pergaulan bebas atau hamil di luar nikah ada ditemukan di tengah masyarakat.

Orang tua yang berpandangan seperti itu relatif berpendidikan tinggi dan cenderung mampu mengawinkan anak mereka setelah SMA/MA dengan tetap melanjutkan ke pendidikan tinggi. Kehidupan rumah tangga anak mereka tersebut tetap ditanggung orang tua kedua belah pihak. Hal itu berbeda dengan keluarga yang miskin dan berpendidikan relatif rendah. Mereka akan cenderung mengawinkan anak mereka secepat mungkin. “*Bila ada nang handak, kukawinkan nai* (bila ada yang mengawini, saya kawinkan)” merupakan pernyataan masyarakat yang lazim di masyarakat. Kecenderungan itu juga terjadi pada keluarga mampu tetapi berpendidikan rendah.

Selain dua hal tersebut, faktor budaya juga memiliki andil terhadap tingginya pernikahan dini di Kalimantan Selatan. Pandangan negatif terhadap anak perempuan yang lambat menikah juga turut mendorong terjadinya pernikahan di, bahkan ada pandangan ekstrem bahwa “*lebih baik balu* (janda) *daripada kada payu* (tidak laku)”. Akan tetapi, pandangan itu sudah hampir hilang dilibas oleh semakin pesatnya perkembangan pendidikan, kecuali di daerah-daerah pegunungan, rawa, atau tepian sungai yang terisolir

Pernikahan Dini, Pendidikan, Kesehatan, dan Kemiskinan

Data persentase pernikahan dini, pendidikan, kesehatan, dan persentase penduduk miskin berdasarkan kabupaten di Kalimantan Selatan dapat dilihat pada tabel 1.

¹⁸AR, Wawancara dengan AR, n.d.

¹⁹AR.

No	Kab/Kota	PD ²⁰	RLS ²¹	AHH ²²	Pov ²³
1	Tabalong	14,82	8,57	70,12	6,01
2	Balangan	33,27	7,04	67,37	9,8
3	Hulu Sungai Tengah	28,69	7,8	65,54	6,01
4	Hulu Sungai Utara	30,86	7,36	63,24	6,5
5	Hulu Sungai Selatan	30,84	7,72	65,59	5,21
6	Tapin	24,04	7,54	69,98	3,41
7	Banjar	24,79	7,29	66,66	2,72
8	Kota Banjarbaru	13,34	10,93	71,67	4,3
9	Kota Banjarmasin	15,12	9,93	70,75	4,20
10	Tanah Laut	21,98	7,38	69,08	4,51
11	Barito Kuala	21,86	7,32	65,59	4,63
12	Tanah Bumbu	21,1	7,7	69,74	4,85
13	Kota Baru	21,63	7,19	68,89	4,49

Tabel 1. Pernikahan Dini, Pendidikan, Kesehatan, dan Kemiskinan.

Keterangan

PD Persentase perempuan yang pernah menikah dibawah umur 16 tahun

RLS Rata-rata lama sekolah

AHH Angka harapan hidup

Pov Persentasi penduduk miskin

Pada kasus Kalimantan Selatan, dapat dilihat hubungan antara pernikahan dini dengan tingkat pendidikan sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2. Berdasarkan data di di tahun 2019, tingkat persentase perempuan yang menikah dibawah usia 16 tahun berkorelasi signifikan ($-0,005 < 0,05$) dengan rata-rata lama sekolah secara negatif atau berlawanan. Dengan kata lain, fakta empirik di Kalimantan Selatan membuktikan bahwa semakin tinggi persentase perempuan yang menikah di bawah usia 16 tahun di Kalimantan Selatan, semakin rendah rata-rata lamanya penduduk menempuh pendidikan. Sebaliknya, semakin rendah persentase pernikahan dini, semakin semakin tinggi rata-rata lama sekolah. Indikator rata-rata lama sekolah tersebut menunjukkan rata-rata jumlah tahun yang penduduk berusia 25 tahun ke atas di sebuah kabupaten menempuh pendidikan. Rendahnya rata-rata lamanya sekolah (RLS) tersebut mencerminkan rendahnya tingkat pendidikan penduduk di sebuah

²⁰BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Selatan 2019, 83.

²¹Badan Pusat Statistik Kalsel BPS, "Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018," Berita Resmi Statistik, Mei 2019, No. 028/05/63/Th.XXII edition, 6, <https://kalsel.bps.go.id/pressrelease/2019/05/06/1393/indeks-pembangunan-manusia--ipm--kalimantan-selatan-pada-tahun-2018-telah-mencapai-70-17-.html>.

²²BPS, 6.

²³Badan Pusat Statistik Kalsel BPS, Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Angka 2020 (Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan, 2020), 217, <https://kalsel.bps.go.id/publication/2020/02/28/2c0d2ecef469521dcb12d190/provinsi-kalimantan-selatan-dalam-angka-2020--penyediaan-data-untuk-perencanaan-pembangunan.html>.

daerah sebaliknya angka RLS yang tinggi mempresentasikan bahwa rata-rata penduduk di sebuah daerah memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

Correlations

		Pernikahan_d ini	RLS	AHH	POV
Pernikahan_dini	Pearson Correlation	1	-.722**	-.792**	.512
	Sig. (2-tailed)		.005	.001	.073
	N	13	13	13	13
RLS	Pearson Correlation	-.722**	1	.616*	-.222
	Sig. (2-tailed)	.005		.025	.465
	N	13	13	13	13
AHH	Pearson Correlation	-.792**	.616*	1	-.306
	Sig. (2-tailed)	.001	.025		.309
	N	13	13	13	13
POV	Pearson Correlation	.512	-.222	-.306	1
	Sig. (2-tailed)	.073	.465	.309	
	N	13	13	13	13

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

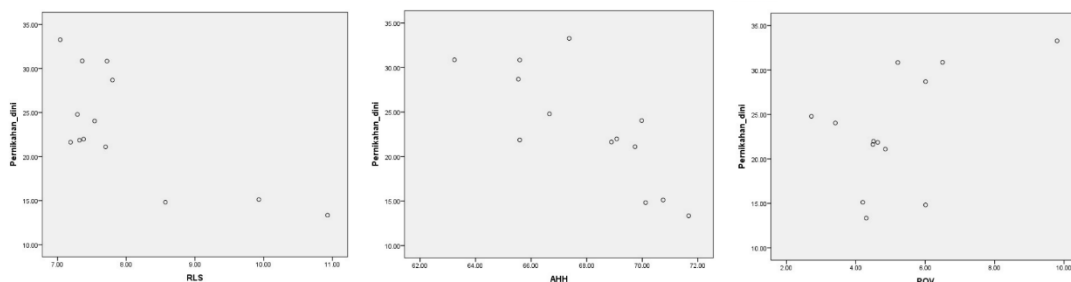
Tabel 2. Hasil Perhitungan Korelasi

Kesehatan dalam penelitian ini dilihat dari angka harapan hidup penduduk Kalimantan Selatan. Pernikahan dini di Kalimantan Selatan memiliki korelasi yang signifikan secara negatif (berlawanan) dengan angka harapan hidup (-0,001<0,05). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa di Kalimantan Selatan, semakin tinggi persentase pernikahan pada usia dibawah 16 tahun, semakin rendah angka harapan hidup atau sebaliknya. Fakta itu, memberikan gambaran bahwa pernikahan usia dibawah 16 tahun akan menyebabkan persoalan kesehatan dan dapat memperpendek angka harapan hidup.

Hal yang relatif berbeda dengan riset lain adalah korelasi pernikahan dini dengan kemiskinan. Fakta empirik di Kalimantan Selatan menunjukkan bahwa perkawinan dibawah usia 16 tahun tidak berkorelasi signifikan (0,073>0,05) dengan tingkat kemiskinan karena nilai Sig. (2-tailed) lebih besar dari nilai signifikansi 0,05). Temuan tersebut menarik karena berbeda dengan riset-riset terdahulu yang menunjukkan bahwa kemiskinan berkorelasi dengan pernikahan dini.

Scatterplot pada gambar 1 dapat dilihat bahwa titik plot membentuk pola garis lurus dari ke bawah kanan naik ke atas kiri pada scatterplot pernikahan dini, pendidikan, dan kesehatan yang menunjukkan korelasi negatif atau berlawanan. Hal itu menggambarkan bahwa semakin rendah persentase pernikahan dini, semakin tinggi rata-rata tingkat pendidikan dan tingkat kesehatan masyarakat. Jika diperhatikan pola yang terbentuk, pola garis lurusnya lebih jelas terlihat pada gambar scatterplot pernikahan dini dan angka harapan hidup (gambar tengah) daripada pola pada pernikahan dini dan pendidikan (gambar kiri). Hal itu sejalan dengan nilai signifikansi pernikahan dini dan angka harapan hidup yang lebih signifikan (0,001) daripada korelasi pernikahan dini dengan pendidikan. Sebaliknya scatterplot korelasi pernikahan dini dengan kemiskinan menggambarkan garis dari bawah kiri naik ke atas

kanan yang menunjukkan nilai positif, akan tetapi titik plot menyebar dan tidak menunjukkan pola yang jelas sehingga dapat dikatakan bahwa pernikahan dini dengan kemiskinan tidak memiliki korelasi yang signifikan.



Gambar 1. Scatterplot Pernikahan Dini, Pendidikan, Kesehatan, dan Kemiskinan

Diskusi

Pernikahan Dini, Mengapa Terjadi?

Dengan merujuk temuan di Bangladesh, India, dan Nepal, Ferreira dan Kamal (2017) menyebutkan bahwa pernikahan dini disebabkan oleh faktor tradisi dan peran dalam keluarga, kemiskinan, pendidikan, peran anak dalam keluarga, keterikatan dengan pekerjaan untuk mendapat penghasilan, dan demografi.²⁴ Pernikahan dini lebih dilihat sebagai pernikahan yang lebih merugikan perempuan daripada lelaki sehingga kajian tentang pernikahan dini merupakan bagian dari perlindungan terhadap perempuan.²⁵

Temuan kami mengkonfirmasi bahwa ketidakjelasan masa depan ekonomi menjadi faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini. Hal itu menggambarkan bahwa pernikahan dini dianggap sebagai solusi praktis dan cepat dari persoalan ekonomi keluarga. Beban membiayai hidup anak akan berkurang jika anak sudah menikah. Sebuah keluarga akan berkurang beban ekonomi ketika mereka segera menikahkan anak mereka.²⁶ Bagi masyarakat yang tidak mampu, tanggung jawab membiayai anak itu dapat menjadi beban yang berat. Ketika ada peluang untuk menikahkan anak, hal itu dianggap jalan yang sah untuk meringankan beban keluarga. Alasan tersebut, menurut kami, terkait dengan kondisi perekonomian masyarakat

²⁴Frances J Ferreira and Mostafa Azad Kamal, "Community Engagement to End Child Early Forced Marriage – Experiences in Selected South Asian Countries" 4, no. 3 (2017): 290.

²⁵Plan Asia Regional Office PLAN and International Center for Research on Women ICRW, "Asia Child Marriage Initiative: Summary of Research in Bangladesh, India, and Nepal" (New Delhi: Plan Asia Regional Office and International Center for Research on Women (ICRW), 2013), 7.

²⁶Emy Susanti, "Women's Knowledge and the Role of Local Female Leaders in Ending the Practice of the Early Marriage of Girls in Rural Communities of Indonesia," *Journal of International Women's Studies*: Bridgewater 20, no. 9 (2019): 16.

Kalimantan Selatan yang relatif baik. Hal itu ditunjukkan dengan rendahnya tingkat kemiskinan di Kalimantan Selatan.

Jika mencermati tiga daerah yang tingkat pernikahan dini tertinggi di Kalimantan Selatan: Balangan, Hulu Sungai Utara, dan Hulu Sungai Selatan, terlihat ada fenomena menarik. Hulu Sungai Selatan adalah kabupaten dengan pernikahan terbanyak ketiga di Kalimantan Selatan tetapi tingkat kemiskinan relatif rendah. Menurut kami, kasus Hulu Sungai Selatan cenderung tidak disebabkan oleh kemiskinan. Hulu Sungai Utara adalah satu-satunya kabupaten yang diklasifikasikan sebagai daerah tertinggal di Kalimantan Selatan dan tingkat kemiskinan tertinggi kedua setelah Balangan.

Pernikahan dini tertinggi di Kalimantan Selatan terjadi di Kabupaten Balangan. Kabupaten ini merupakan kabupaten yang tertinggi angka kemiskinan. Padahal Kabupaten Balangan merupakan tempat beroperasi PT Adaro Indonesia, perusahaan batu bara dengan produksi terbesar kedua di Indonesia. Pernikahan dini di dua kabupaten tertinggi kedua dan ketiga ini, menurut kami, cenderung disebabkan oleh kemiskinan. Akan tetapi, jika dilihat secara umum di semua kabupaten, kemiskinan tidak berkorelasi dengan pernikahan dini.

Pernikahan dini karena kemiskinan tersebut dapat dipahami dari dua hal. Pertama, pernikahan dini dianggap mengurangi beban keluarga. Anak yang menikah tidak lagi menjadi tanggungan orang tua sehingga akan mengurangi beban keuangan keluarga. Keluarga tersebut dapat hidup lebih layak karena pengeluaran berkurang. Kedua, anak yang dinikahkan pada usia dini akan menjadi tanggungan suaminya. Anak tersebut secara ekonomi akan lebih baik karena hidup dengan suaminya yang dinilai secara ekonomi relatif lebih baik.

Pada masyarakat Banjar, anak harus dijaga dari tindakan yang akan menimbulkan permasalahan, termasuk yang terkait dengan hubungan lelaki-perempuan. Hal itu sejalan dengan temuan Kohno *et al* (2020) yang menunjukkan bahwa pernikahan dini disebabkan keinginan orang tua untuk menjaga anaknya dari seks sebelum nikah yanghal tersebut melanggar ajaran agama Islam.²⁷ Orang tua yang berpandangan seperti itu dan relatif berpendidikan tinggi dan mampu cenderung mengawinkan anak mereka setelah SMA/MA tetapi tetap melanjutkan ke pendidikan tinggi. Kehidupan rumah tangga anak mereka tersebut tetap ditanggung orang tua kedua belah pihak. Hal itu berbeda dengan keluarga yang miskin dan berpendidikan relatif rendah. Mereka akan cenderung mengawinkan anak mereka secepat mungkin. “Bila ada nang handak, kukawinkan nai (bila ada yang mengawini, saya kawinkan)” merupakan pernyataan masyarakat yang lazim di masyarakat. Kecenderungan itu juga terjadi pada keluarga mampu tetapi berpendidikan rendah.

Pandangan itu dapat bersumber dari pandangan-pandangan agama tentang kewajiban memelihara keluarga dari api neraka. Pernikahan itu tentu saja akan cenderung pula memperkecil kesempatan untuk meneruskan ke pendidikan tinggi,

²⁷Ayako Kohno et al., “Why Girls Get Married Early in Sarawak, Malaysia - an Exploratory Qualitative Study,” *BMC Women’s Health* 20, no. 1 (December 2020): 4, <https://doi.org/10.1186/s12905-020-00911-z>.

meskipun memiliki kemampuan finansial untuk melanjutkan pendidikan. Kebanyakan pasangan-pasangan muda yang tetap melanjutkan pendidikan (kuliah) adalah pasangan yang menikah pada saat sudah menempuh kuliah. Sangat jarang menemukan pasangan muda yang setelah menikah, kemudian mendaftar untuk melanjutkan kuliah setelah menamatkan SMA/MA.

Alasan tersebut sangat berhubungan dengan pemahaman mereka tentang hukum Islam. Pernikahan dini dari sudut pandang hukum keluarga Islam dapat merujuk pada keputusan Ijtima Ulama. *Pertama*, secara eksplisit, tidak ada batasan usia minimal untuk melangsungkan pernikahan. *Kedua*, pernikahan dini sah apabila terpenuhi syarat dan rukun nikah dan haram apabila pernikahan tersebut dapat mengakibatkan mudharat. *Ketiga*, kematangan usia merupakan salah satu indikator akan tercapainya tujuan perkawinan, yaitu kemaslahatan hidup berumah tangga dan bermasyarakat serta jaminan keamanan bagi kehamilan. *Keempat*, kemaslahatan perkawinan dapat diawali dengan meujuk pada ketentuan perkawinan dikembalikan pada standardisasi usia sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai pedomannya.

Dalil-dalil yang menjadi dasar penetapan ketentuan hukum terdapat dalam Al Qur'an surat An Nisa' ayat 6, surat At Thalaq ayat 4, surat An Nur ayat 32, hadits Muttafaq Alaih dari Aisyah, hadits Bukhari dan Muslim dari Al Qamah, kaidah fiqh dalam Qawaid Al Ahkam fi Mashâlih Al Anam,²⁸ pandangan jumhur fuqaha yang membolehkan pernikahan dibawah umur, pandangan Ibnu Syubrumah, dan pendapat Ibnu Hazm yang memilah antara pernikahan anak lelaki kecil dengan anak perempuan kecil. Pernikahan anak perempuan yang masih oleh bapaknya dibolehkan, sedangkan pernikahan anak lelaki yang masih kecil dilarang.²⁹

Pendapat tentang pernikahan dini tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga. *Pertama*, jumhur fuqaha yang membolehkan pernikahan di bawah umur tetapi tidak serta merta membolehkan hubungan badan. Hukum seperti ini sangat sulit untuk dijalankan, meskipun Rasulullah telah mempraktikkannya ketika beliau menikahi Aisyah RA. Jika hubungan badan akan mengakibatkan adanya *dharar*, maka hal itu terlarang, baik pernikahan di usia dini maupun sudah dewasa. Hal itu merujuk pada kaidah fikih tentang adanya kemashlahatan dan kerusakan.³⁰ *Kedua*, menurut Ibnu Syubrumah pernikahan di bawah umur dilarang Islam.³¹ *Ketiga*, Ibnu Hazm berpendapat bahwa pernikahan anak perempuan yang masih kecil oleh bapaknya dibolehkan sedangkan anak lelaki yang masih kecil dilarang.³²

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa hukum keluarga Islam tidak secara eksplisit menetapkan pada umur berapa pernikahan boleh dilaksanakan. Batasan yang dapat dilihat adalah apabila tidak menimbulkan mudharat bagi kedua belah pihak, suami-isteri. Menurut kami, mudharat atau tidak sebuah pernikahan dini sangat

²⁸Abû Muhammad 'Izzuddîn, *Qawâ'idu al-Abkâm Fî Mashâlih al-Anâm*, vol. I (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1999), 94.

²⁹Wahbah Az Zuhayli, *Al Fiqhul Islami Wa Adillatub* (Beirut: Darul Fikr, 1985), 179.

³⁰'Izzuddîn, *Qawâ'idu al-Abkâm Fî Mashâlih al-Anâm*, I:94.

³¹Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, vol. IX (Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, 2010), 459.

³²Az Zuhayli, *Al Fiqhul Islami Wa Adillatub*, 179.

subyektif dan cenderung berargumen dengan pengalaman orang-orang terdahulu yang cocok dengan keinginannya. Keluarga yang mengawinkan anak mereka di usia dini akan berargumen dengan contoh orang lain atau dirinya sendiri yang tidak merasakan dampak negatif dari pernikahan dini. Oleh karena itulah, pernikahan dini masih saja terjadi pada masyarakat Banjar. Selain dua hal tersebut, menurut kami, faktor budaya juga memiliki andil terhadap tingginya pernikahan dini di Kalimantan Selatan. Pandangan negatif terhadap anak perempuan yang lambat menikah juga turut mendorong terjadinya pernikahan dini.

Pernikahan dini di Kalimantan Selatan cenderung lebih banyak terjadi di daerah pedesaan daripada di kota. Hal itu berhubungan pandangan masyarakat kota tentang pentingnya pendidikan yang kemudian berdampak pandangan tentang pernikahan di usia muda. Penyebab lain adalah kesadaran hukum masyarakat kota tentang pentingnya nikah tercatat yang mensyaratkan usia sebagaimana tertuang dalam UU Perkawinan. Legislasi tentang batas usia melangsungkan perkawinan turut memberi andil berkurangnya pernikahan dini. Hal itu juga menyebabkan semakin meningkatnya jumlah anak-anak perempuan yang menempuh pendidikan dasar.³³

Pernikahan Dini, Pendidikan, Kesehatan, dan Kemiskinan

Pernikahan Dini dan Pendidikan

Temuan riset kami ini mengonfirmasi temuan riset-riset yang menunjukkan dampak negatif pernikahan dini (*early marriage*) terhadap pendidikan. Dalam kasus Kalimantan Selatan, pernikahan dini berhubungan signifikan dengan tingkat pendidikan. Hal itu sejalan riset-riset yang menemukan bahwa pernikahan dini tidak berasosiasi dengan pertumbuhan anak tetapi memiliki hubungan signifikan dengan pengembangan anak.³⁴ Orang tua yang berpendidikan lebih tinggi cenderung menolak pernikahan dini. Pendidikan dapat menurunkan tingkat pernikahan dini.³⁵ Pendidikan yang baik dan menjaga anak perempuan untuk sekolah berperan penting dalam menghilangkan pernikahan dini dan perkawinan paksa.³⁶

³³Susan Blackburn and Sharon Bessell, "Marriageable Age: Political Debates on Early Marriage in Twentieth-Century Indonesia," *Indonesia* 63, no. 63 (April 1997): 134, <https://doi.org/10.2307/3351513>.

³⁴Ayling Sanjaya et al., "Early Marriage and Its Relationship with Child Development," *Indian Journal of Public Health Research & Development* 9, no. 9 (2018): sec. Results, <https://doi.org/10.5958/0976-5506.2018.00993.2>.

³⁵Ahmed F. Hamed and Fouad M. A. Yousef, "Prevalence, Health and Social Hazards, and Attitude toward Early Marriage in Ever-Married Women, Sohag, Upper Egypt.," *Journal of the Egyptian Public Health Association* 92, no. 4 (October 2017): sec. Abstract, <http://e-resources.perpusnas.go.id:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edb&AN=134060429&site=eds-live>.

³⁶Lilian K. Ganira et al., "Early and Forced Child Marriage on Girls' Education, in Migori County, Kenya: Constraints, Prospects and Policy," *World Journal of Education* 5, no. 4 (January 1, 2015): 74, <http://e-resources.perpusnas.go.id:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=eric&AN=EJ1158598&site=eds-live>.

Pendidikan yang rendah berkorelasi dengan pernikahan dini, menurut kami, juga dapat dipahami bahwa rendahnya tingkat pendidikan dapat mendorong terjadinya pernikahan dini. Kohno et al (2020) yang mengungkapkan bahwa banyak dari pasangan pernikahan usia dini telah putus sekolah sebelum mereka menikah.³⁷ Ketika telah berhenti sekolah, kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tidak lagi terbuka lebar. Hal itu akan berdampak pada sikap dan pandangan hidup mereka. Mereka yang berpendidikan rendah akan lebih cenderung untuk tidak memperlmasalah dan menerima pernikahan dini. Hal itu berbeda dengan orang tua yang berpendidikan lebih tinggi yang cenderung tidak menerima pernikahan dini.³⁸ Oleh karena itulah, dampak lebih jauh adalah pasangan yang menikah usia dini adalah pada pendidikan anak-anak mereka. Pada umumnya, pasangan yang menikah dini tidak akan menanamkan kepada anak-anak mereka tentang pentingnya pendidikan sehingga anak-anak mereka juga cenderung tidak mendapat pendidikan yang relatif berkualitas dan tidak menolak pernikahan dini. Sebaliknya, masyarakat yang tingkat pendidikan lebih tinggi akan cenderung untuk mencegah terjadinya pernikahan dini di keluarga mereka.

Teori *human capital* menjelaskan bahwa tingkat pendidikan masyarakat juga dipengaruhi oleh rendahnya kesenjangan penghasilan (*wage inequality*). *Inequality* mencerminkan besarnya penghasilan seseorang sebagai balikan menginvestasikan biaya (*return investment*) *human capital*.³⁹ Oleh karena itu, sekolah/madrasah dan pengambilan keputusan berperan untuk meningkatkan manfaat (*benefit*) pembelajaran sehingga masyarakat beranggapan pendidikan akan mendatangkan manfaat lebih banyak daripada berhenti sekolah. Manfaat pendidikan tidak hanya dilihat dari manfaat yang bernilai uang, tetapi juga manfaat yang tidak bernilai uang. Kedermawanan, komunikasi terhadap orang lain, kebersihan, peduli terhadap kesehatan, serta menjunjung tinggi hukum merupakan manfaat non finansial.

Manfaat langsung pendidikan bagi perempuan adalah meningkatkan *self efficacy* (percaya bahwa dirinya akan sukses), meningkatkan *life skills*, kapasitas domestik berhubungan pengelolaan rumah tangga dan dapat mendukung anak yang lebih berpendidikan serta mengembangkan karir potensial. Selain itu, pendidikan akan memberikan manfaat bagi komunitas: sebagai role model, komunitas yang berpendidikan dan keturunan, tidak pengangguran dan pembangunan ekonomi.⁴⁰ Pendapat Anita et al (2019) tersebut menunjukkan pendidikan dapat meningkatkan

³⁷Kohno et al., "Why Girls Get Married Early in Sarawak, Malaysia - an Exploratory Qualitative Study," 8.

³⁸Ashis Talukder et al., "Early Marriage in Bangladesh: A Cross-Sectional Study Exploring the Associated Factors," *Journal of International Women's Studies* 21, no. 1 (2020): 71.

³⁹Melissa S. Kearney and Phillip B. Levine, "Income Inequality, Social Mobility, and the Decision to Drop Out of High School," *Brookings Papers on Economic Activity*, 2016, 361, <http://e-resources.perpusnas.go.id:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsjsr&AN=edsjsr.43869027&site=eds-live>.

⁴⁰Anita Raj et al., "Students and Brides: A Qualitative Analysis of the Relationship between Girls' Education and Early Marriage in Ethiopia and India," *BMC Public Health* 19, no. 1 (December 2019): 5, <https://doi.org/10.1186/s12889-018-6340-6>.

kemampuan perempuan dalam mengelola rumah tangga dan memelihara anak. Dengan demikian, mereka akan memahami dampak pernikahan dini bagi anak mereka dan akan menjaganya dari pernikahan dini.

Meskipun demikian, pendidikan bagi perempuan masih berhadapan dengan pandangan negatif tentang pendidikan perempuan. Perempuan yang berpendidikan tinggi akan menyebabkan “*urang kada wani ma ambil bini, kababatan* (orang tidak berani untuk melamar karena perempuan berpendidikan tinggi terlalu hebat)”. Dalam pandangan tersebut tercermin bahwa pendidikan bagi perempuan tidak penting karena menyebabkan perempuan terlambat menikah karena para lelaki kurang menyukai perempuan berpendidikan tinggi. Dalam istilah Raj et al (2019) perempuan pendidikan tinggi diinginkan dalam pasar perjodohan (*marriage market*).⁴¹ Pandangan semacam itu menjadi salah satu faktor pernikahan dini di tengah masyarakat dan rendahnya pendidikan anak.

Di sisi lain, putus sekolah tidak selalu berhubungan dengan sosio ekonomi keluarga. Dengan kata lain, keluarga miskin dimungkinkan untuk berhasil dalam pendidikan ketika keluarga tersebut memiliki *social capital* untuk pendidikan. Oleh karena itu, dengan dukungan komunitas dan pemerintah, pasangan yang menikah dini harus didorong untuk dapat membangun *social capital* dalam rumah tangga mereka. Condon dkk (2016) menyebutkan bahwa *social capital* terkait dengan tiga dimensi yaitu kepercayaan, harapan, dan kedekatan hubungan antargenerasi.⁴²

Pertama, kepercayaan. Kepercayaan akan relevan ketika ada ketergantungan antara satu orang dengan yang lain atau lebih untuk sesuatu yang mereka butuhkan. Kepercayaan ditandai oleh kesediaan untuk rentan terhadap pengkhianatan dan bahaya.⁴³ Ketika kepercayaan telah didapatkan pada seseorang, itu akan menjadi dasar dari proses pengembangan berikutnya.⁴⁴ Kepercayaan (*trust*) dapat dilihat dari empat aspek yaitu kebajikan (*benevolence*), kejujuran (*honesty*), keterbukaan (*openness*), keandalan (*reliability*), dan kompetensi.⁴⁵

Kebajikan (*benevolence*) merupakan salah satu aspek kepercayaan. tercermin dari kepercayaan bahwa orang lain melindunginya. Kebajikan merupakan satu tingkatan dari kepedulian. Dengan kata lain, adanya perasaan dilindungi, tidak diganggu, dan dipedulikan merupakan indikasi dari kepercayaan.

Kejujuran merupakan kepercayaan bahwa apa yang dikatakan orang lain adalah benar. Kejujuran memperhitungkan persepsi tentang integritas, karakter, dan

⁴¹Raj et al., 8.

⁴²Meghan Condon, Lesley Lavery, and Par Jason Engle, “Measuring Social Capital: Accounting for Nested Data and Subnetworks Within Schools,” *Social Indicators Research* 126, no. 3 (April 2016): 1194, <https://doi.org/10.1007/s11205-015-0945-2>.

⁴³Megan Tschannen-Moran and Christopher Gareis, “Principals, Trust, and Cultivating Vibrant Schools,” *Societies* 5, no. 2 (March 27, 2015): 259, <https://doi.org/10.3390/soc5020256>.

⁴⁴Alain Topor, Lisa Skogens, and Ninive von Greiff, “Building Trust and Recovery Capital: The Professionals’ Helpful Practice,” *Advances in Dual Diagnosis* 11, no. 2 (May 21, 2018): 81, <https://doi.org/10.1108/ADD-11-2017-0022>.

⁴⁵Megan Tschannen-Moran, *Trust Matters: Leadership for Successful Schools*, Second edition (San Francisco: Jossey-Bass, 2014).

keaslian. Seseorang akan dinilai jujur apabila berkata benar, tepat janji, dan melaksanakan rencana dan program dan tepat.⁴⁶ Kejujuran memiliki keterkaitan dengan keterbukaan (*openness*) yang merupakan kesediaan berbagi berbagai informasi akan lebih rentan. Oleh karena itulah, keterbukaan informasi dan komunikasi merupakan manifestasi kepercayaan.

Aspek lain dari kepercayaan adalah keandalan. Seseorang dianggap memiliki keandalan jika dapat melakukan sesuatu seperti yang diharapkan secara umum. Dalam rumah tangga, seorang anak memiliki kepercayaan terhadap orang tuanya ketika mereka dapat menduga apa yang akan dilakukan oleh orang tuanya. Keandalan akan semakin tinggi ketika seseorang memiliki kompetensi. Kompetensi merupakan kemampuan untuk melaksanakan tugas sesuai harapan dan standar. Kepercayaan tetap ada meskipun seseorang tidak dapat menunjukkan kompetensi. Akan tetapi, rendahnya kompetensi akan terus menggerus kepercayaan. Lima aspek kepercayaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Aspek	Indikator
1	kebajikan (<i>benevolence</i>)	Peduli, bersahabat, menunjukkan rencana yang positif, mendukung, menyatakan penghargaan atas upaya orang lain, bersikap adil, menjaga informasi rahasia
2	kejujuran (<i>honesty</i>)	menunjukkan integritas, mengatakan yang sebenarnya, menepati janji, menghormati perjanjian, menjadi otentik, menerima tanggung jawab, menghindari manipulasi, nyata, jujur pada diri sendiri
3	keterbukaan (<i>openness</i>)	Keterbukaan informasi, informasi yang akurat, dan kejelasan alasan dalam pengambilan keputusan
4	keandalan (<i>reliability</i>)	Dianggap mampu melaksanakan sesuatu
5	kompetensi	Kemampuan dalam mengerjakan suatu pekerjaan

Tabel 3. Aspek *Trust*

Sumber: Moran dan Garies (2015).⁴⁷

Kedua, harapan (*hope*). harapan (*hope*) sangat berperan dalam meningkatkan motivasi menempuh pendidikan. Lazarus (1999) dengan lengkap menjelaskan tentang peran harapan (*hope*) bagi individu. Harapan adalah sikap yang berorientasi masa

⁴⁶Carolyn H. Gbunlee, "Trust in Transition: How New Principals Develop Trust with Faculty During Their Transition Period" (Connecticut, Central Connecticut State University, 2016), 15.

⁴⁷Tschannen-Moran and Gareis, "Principals, Trust, and Cultivating Vibrant Schools," 259–62.

depan sehingga sangat penting untuk terus dijaga dan dikembangkan. “*without hope, we are not likely to act on our own behalf*”, tulisnya.⁴⁸ Orang tua yang menceritakan tentang kontribusi pendidikan terhadap kesuksesan sosio ekonomi merupakan salah satu bentuk dari *social capital* keluarga.⁴⁹ Dari perbincangan dengan orang tua tersebut akan muncul harapan-harapan anak sehingga dia akan lebih termotivasi untuk lebih berusaha keras dalam mengikuti proses pendidikan proses pendidikan.

Harapan dapat dibangun dengan nasihat seperti Atn, seorang ibu dari keluarga miskin yang anaknya selalu menduduki peringkat 3 besar dikelasnya, “*balajar bujur-bujur, supaya kaina kada kayak mama* (belajarlah dengan serius, supaya kelak tidak seperti mama)”. Kalimat “*supaya kada kaya mama*” bagi puterinya, Ftm Za, dipahami dengan sangat baik bahwa orang tuanya sekarang hidup pas-pasan dan berharap dia akan menjadi orang pintar dan akan mengubah kehidupannya menjadi lebih baik. Harapan orang tuanya itu menjadi motivasi paling mendasar untuk belajar dan menempuh pendidikan setinggi-tingginya, “*supaya kada kaya mama*”.

Keluarga miskin yang menikahkan anak perempuan mereka disebabkan oleh rendahnya harapan mereka tentang masa depan. Tanpa harapan, keluarga miskin menganggap bahwa kehidupan mereka tidak akan berubah sehingga tidak ada usaha keras untuk mengubahnya. Tanpa harapan, keluarga miskin akan putus asa. Harapan akan menjadikan mereka percaya bahwa kemungkinan untuk kehidupan yang lebih baik selalu ada.⁵⁰ Pada kondisi demikian, keterlibatan komunitas sangat penting untuk membangun harapan-harapan tentang masa depan pada anak-anak dari keluarga miskin. Pemimpin komunitas, termasuk keagamaan, memiliki pengaruh besar bagi pengambilan keputusan dalam keluarga anggota komunitas. Komunitas dapat berkampanye dan mendorong anak-anak untuk tetap bersekolah.⁵¹

Dari sekolah itulah, anak-anak akan dapat melihat harapan-harapan tentang masa depan. Selain itu, kesadaran tentang dampak negatif pernikahan dini, peluang untuk mendapat penghasilan dapat ditemukan dari pendidikan. Oleh karena itulah, pendidikan menjadi tonggak awal dalam mengeliminir pernikahan dini. Pendidikan adalah kunci untuk memutus siklus permasalahan yang muncul akibat pernikahan dini.⁵²

Ketiga, kedekatan hubungan antargenerasi. Kedekatan hubungan antargenerasi dapat dilihat dari ajakan atau undangan kepada orang lain. Semakin sering diundang

⁴⁸Richard S. Lazarus, “Hope: An Emotion and a Vital Coping Resource Against Despair,” *Social Research* 66, no. 2 (1999): 666, <http://e-resources.perpusnas.go.id:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsjrs&AN=edsjrs.40971343&site=eds-live>.

⁴⁹Alfred Kuranchie and Hillar Addo, “Differential Parental Social Capital Investment in Children’s Education: Research Evidence,” *African Educational Research Journal* 5, no. 3 (September 1, 2017): 208.

⁵⁰Richard S. Lazarus, “Hope,” 674.

⁵¹Ferreira and Kamal, “Community Engagement to End Child Early Forced Marriage – Experiences in Selected South Asian Countries,” 304.

⁵²Ganira et al., “Early and Forced Child Marriage on Girls’ Education, in Migori County, Kenya: Constraints, Prospects and Policy,” 76.

atau mengundang orang lain menunjukkan semakin dekat hubungan antargenerasi.⁵³ Sosial kapital dalam keluarga tercermin dari kedekatan hubungan antara orang tua dengan anak. Kedekatan hubungan ini tercermin dari keinginan orang tua dan anak untuk mengikuti kegiatan bersama di rumah atau di luar rumah. Orang tua yang memiliki kedekatan hubungan akan mengajak anaknya untuk berkunjung ke rumah keluarga atau hal lain secara bersama. Sebaliknya, anak yang merasa memiliki kedekatan hubungan dengan orang tuanya akan merasa senang untuk mengajak orang orang tuanya dalam kegiatan tertentu.

Pernikahan Dini dan Kesehatan

Dampak lain yang kami temukan berkorelasi signifikan dengan pernikahan dini adalah kesehatan. Hal itu sejalan dengan riset-riset tentang pernikahan dini. Ketidakmatangan fisik akan menyebabkan risiko bagi kesehatan ibu dan bayi yang dapat berujung pada kematian. Risiko kematian ibu sangat tinggi jika melahirkan dibawah 20 tahun.⁵⁴ Pernikahan dini juga akan mempertinggi kemungkinan menderita kanker serviks. Semakin tinggi usia ketika menikah akan meningkatkan kepedulian terhadap kesehatannya dan kesehatan anak.⁵⁵ Mereka yang menikah pada usia dini relatif tidak memeriksa kesehatan sebelum dan melahirkan, tidak melakukan vaksinasi untuk anak, dan tidak peduli tentang gizi anak. Oleh karena itulah, pernikahan dini memperbesar angka kematian ibu dan anak. Di negara berkembang, usia pada pernikahan pertama sangat mempengaruhi tingkat kematian ibu dan anak. Semakin tinggi usia menikah, semakin rendah pula tingkat kematian ibu dan anak.⁵⁶ Perempuan yang melahirkan sebelum berumur 20 tahun menunjukkan lebih mudah depresi, gelisah, dan mengalami *somatic symptom*.⁵⁷

Permasalahan kesehatan terkait tersebut menurut kami disebabkan oleh rendahnya pengetahuan mereka tentang kesehatan. Dengan kata lain, kesadaran perempuan tentang dampak negatif pernikahan dini terhadap kesehatan masih rendah.⁵⁸ Oleh karena itu, posisi pendidikan sangat penting untuk meningkatkan literasi masyarakat dan anak-anak tentang dampak negatif pernikahan dini.

⁵³Condon, Lavery, and Engle, "Measuring Social Capital," 1194.

⁵⁴J. Walker, "Early Marriage in Africa - Trends, Harmful Effects and Interventions," *African Journal of Reproductive Health* 16, no. 2 (n.d.): 234.

⁵⁵Marcos Delprato and Kwame Akyeampong, "The Effect of Early Marriage Timing on Women's and Children's Health in Sub-Saharan Africa and Southwest Asia," *Annals of Global Health* 83, no. 3-4 (November 8, 2017): 566, <https://doi.org/10.1016/j.aogh.2017.10.005>.

⁵⁶Md. Akhtarul Islam and Abdur Rahman, "Age at First Marriage and Fertility in Developing Countries: A Meta Analytical View of 15 Demographic and Health Surveys," *Clinical Epidemiology and Global Health*, January 2020, 4, <https://doi.org/10.1016/j.cegh.2020.01.018>.

⁵⁷Aysen Ufuk Sezgin and Raija-Leena Punamäki, "Impacts of Early Marriage and Adolescent Pregnancy on Mental and Somatic Health: The Role of Partner Violence," *Archives of Women's Mental Health*, April 6, 2019, sec. Discussion, <https://doi.org/10.1007/s00737-019-00960-w>.

⁵⁸Susanti, "Women's Knowledge and the Role of Local Female Leaders in Ending the Practice of the Early Marriage of Girls in Rural Communities of Indonesia," 19.

Pernikahan Dini dan Kemiskinan

Studi lain juga menunjukkan bahwa pernikahan dini berdampak terhadap kemiskinan. Pernikahan dini merupakan faktor penting dari pertumbuhan populasi, berefek langsung terhadap peningkatan angka kelahiran, kematian, imigrasi, dan kondisi sosial ekonomi seseorang.⁵⁹ Pernikahan dini akan menyebabkan tingginya angka perceraian di usia muda. Tingginya perceraian itu akan berakibat negatif secara sosial, bahkan dapat berakhir pada prostitusi.⁶⁰ Pendapat itu menunjukkan bahwa pernikahan dini akan berdampak bagi kemiskinan yang kemudian berujung pada prostitusi. Pernikahan dini akan berdampak pada ekonomi keluarga. Suami-Isteri yang masih muda tidak memiliki pekerjaan yang mapan sehingga akan menyebabkan kesulitan ekonomi. Hal tersebut menyebabkan anak yang sudah menikah masih menjadi tanggungan keluarga khususnya orang tua dari pihak laki-laki (suami). Akibatnya orang tua memiliki beban ganda, selain harus menghidupi keluarga, mereka juga harus menghidupi anggota keluarga baru. Kondisi ini akan berlangsung secara repetitif turun temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya sehingga kemiskinan struktural akan terbentuk.⁶¹

Akan tetapi, temuan kami di Kalimantan Selatan, menunjukkan bahwa pernikahan dini tidak berkorelasi signifikan dengan tingkat kemiskinan. Temuan tersebut menarik karena berbeda dengan riset-riset terdahulu yang menunjukkan bahwa kemiskinan berkorelasi dengan pernikahan dini. Dalam jangka pendek, menurut kami, pernikahan dini tidak berkorelasi dengan tingkat kemiskinan, terutama dalam kasus Kalimantan Selatan, yang lapangan kerja mengandalkan sumber daya alam. Akan tetapi dalam jangka panjang pernikahan dini akan memiliki dampak terhadap kemiskinan, ketika sumber daya alam tidak dapat diandalkan lagi sebagai sumber penghasilan.

Dalam jangka panjang, pernikahan dini menyebabkan keluarga tersebut tetap berada dalam mata rantai ketidakmampuan ekonomi. Jika dilihat dari sudut pandang teori *human capital* (HCT), pernikahan dini akan menyebabkan semakin mengecilnya kesempatan untuk meningkatkan produktivitas melalui pendidikan. Titik utama HCT adalah pendidikan akan meningkatkan produktivitas yang meningkatkan penghasilan.⁶² Sumber daya alam yang terbatas akan menuntut human capital sebagai pengganti sumber daya alam.

Hampir dapat dipastikan, seorang yang menikah pada usia dibawah 16 tahun tidak akan menempuh pendidikan tinggi. Meskipun tidak semua, mayoritas

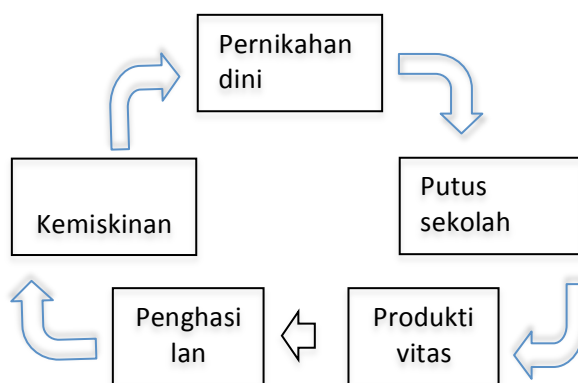
⁵⁹Ghazala Umer Bagahl et al., *Empirical Analytical Study on Socio-Economic Factor of Early Marriages: A Case Study of Badin District, Sindh, Pakistan*. (University of Sindh, Jamshoro, Pakistan, Department of Political Science December 2016).

⁶⁰Kartikawati, "Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia," 13.

⁶¹Kartikawati, 13.

⁶²Joy Cooper and Larry Davis, "Exploring Comparative Economic Theories: Human Capital Formation Theory vs Screening Theory," *Journal of Applied Business & Economics* 19, no. 6 (October 2017): 69, <http://e-resources.perpusnas.go.id:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ent&AN=126155423&site=eds-live>.

pernikahan dini memperkecil peluang untuk bersekolah atau melanjutkan ke pendidikan tinggi. Pernikahan dini menjadi salah satu sebab rendahnya tingkat pendidikan perempuan.⁶³ Hal itu dibuktikan dengan tingginya korelasi persentase pernikahan dini dengan angka rata-rata lamanya sekolah di Kalimantan Selatan. Dalam kondisi demikian, perempuan akan menjadi pihak yang dirugikan. Keluarga miskin akan lebih memilih anak lelaki untuk disekolahkan dan anak perempuan akan menerima pilihan untuk menikah.⁶⁴ Padahal, pendidikan adalah kekuatan yang ampuh untuk mengentaskan kemiskinan. Anak yang lahir dari pernikahan dini akhir terjebak dalam siklus itu



Gambar 2. Siklus Pernikahan Dini, Pendidikan, dan Kemiskinan

Hubungan yang tidak signifikan antara pernikahan dini dengan kemiskinan di Kalimantan Selatan, menurut kami, hal itu tidak terlepas dari masih relatif masih terbukanya lapangan kerja pada sektor pertambangan batu bara. Sektor batu bara merupakan penyumbang terbesar (18,03%) dari ekonomi Kalimantan Selatan. Angka tersebut lebih besar daripada sektor pertanian yang berperan sebesar 16,20%.⁶⁵

Perusahaan tambang batu bara memberikan peluang kerja dari level terendah sampai tertinggi dengan gaji yang relatif besar bagi penduduk sekitar tambang batu bara. Hal itu turut memiliki andil bagi meningkatnya kesejahteraan ekonomi penduduk. Jika melihat data pada tabel 1, daerah dekat tambang, kecuali Kabupaten Balangan, memiliki tingkat kemiskinan yang relatif rendah. Kasus Balangan, yang memiliki persentase penduduk miskin dan pernikahan dini tertinggi menarik untuk dicermati pada riset lain yang relevan. Balangan menunjukkan fenomena yang unik, daerah tambang, tetapi kemiskinan dan pernikahan dini tinggi.

Dalam konteks hukum keluarga, pernikahan dini berdampak terhadap pernikahan tidak tercatat. Ketika pernikahan dicatatkan pada lembaga resmi

⁶³Ferreira and Kamal, "Community Engagement to End Child Early Forced Marriage – Experiences in Selected South Asian Countries," 288.

⁶⁴PLAN and ICRW, "Asia Child Marriage Initiative: Summary of Research in Bangladesh, India, and Nepal," 8.

⁶⁵Badan Pusat Statistik Kalsel BPS, *Profil Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Selatan Februari 2019* (Banjarmasin: Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan, 2019), 24.

pemerintah, seseorang telah memiliki sebuah dokumen resmi yang bisa dijadikan sebagai alat bukti dihadapan majelis peradilan. Sebaliknya, pernikahan yang tidak memiliki dokumen resmi berupa akta nikah berarti status pernikahan tersebut tidak memiliki dokumen yang diakui sebagai alat bukti. Hal itu akan menjadi permasalahan krusial dan merugikan pihak perempuan ketika ada sengketa yang berkaitan dengan pernikahan, maupun sengketa yang lahir akibat pernikahan, seperti waris, hak asuh anak, perceraian, nafkah dan sebagainya. Hal ini tentunya akan berdampak negatif terhadap hak-hak isteri dan anak-anak

Simpulan

Pernikahan dini lebih cenderung didorong oleh ekonomi keluarga. Pernikahan dini dianggap sebagai solusi bagi persoalan ekonomi dalam keluarga. Selain itu, pernikahan dini dianggap sebagai bentuk memelihara keluarga dari tindakan yang dapat memalukan keluarga karena hamil diluar nikah dan pandangan negative masyarakat.

Dalam kasus Kalimantan Selatan, pernikahan dini memiliki korelasi signifikan dengan tingkat pendidikan ($0,005 < 0,05$) dan angka harapan hidup ($0,001 < 0,55$) dengan korelasi negatif. Temuan tersebut menunjukkan bahwa di Kalimantan Selatan, semakin rendah persentase pernikahan dini, semakin tinggi pula tingkat pendidikan masyarakat dan tinggi angka harapan hidup masyarakat. Sebaliknya, semakin tinggi persentase pernikahan dini, semakin rendah tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat. Akan tetapi, pernikahan dini tidak berkorelasi ($0,073 > 0,05$) dengan tingkat kemiskinan di Kalimantan Selatan.

Daftar Pustaka

- Adharsyah, Taufan. "Miris, Tingkat Kemiskinan di 6 Provinsi Ini Meningkat." news. Accessed August 14, 2019. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190715164211-4-85070/miris-tingkat-kemiskinan-di-6-provinsi-ini-meningkat>.
- Az Zuhayli, Wahbah. *Al Fiqhul Islami Wa Adillatub*. VII vols. Beirut: Darul Fikr, 1985.
- Bagahl, Ghazala Umer, Nosheen Khaskhelly, Erum Khushnood Zahid Shaikh, and Maria Aijaz Sheikh. *Empirical Analytical Study nn Socio-Economic Factor of Early Marriages: A Case Study of Badin District, Sindh, Pakistan*. (University of Sindh, Jamshoro, Pakistan, Department of Political Science December 2016).
- Blackburn, Susan, and Sharon Bessell. "Marriageable Age: Political Debates on Early Marriage in Twentieth-Century Indonesia." *Indonesia* 63, no. 63 (April 1997): 107. <https://doi.org/10.2307/3351513>.
- BPS, Badan Pusat Statistik Kalsel. "Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018." *Berita Resmi Statistik*. Mei 2019, No. 028/05/63/Th.XXII edition. <https://kalsel.bps.go.id/pressrelease/2019/05/06/1393/indeks->

pembangunan-manusia--ipm--kalimantan-selatan-pada-tahun-2018-telah-mencapai-70-17-.html.

- . *Profil Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Selatan Februari 2019*. Banjarmasin: Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan, 2019.
- . *Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Angka 2020*. Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan, 2020. <https://kalsel.bps.go.id/publication/2020/02/28/2c0d2ecef469521dcb12d190/provinsi-kalimantan-selatan-dalam-angka-2020--penyediaan-data-untuk-perencanaan-pembangunan.html>.
- . *Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Selatan 2019*. Banjarmasin: Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan, 2020.
- Condon, Meghan, Lesley Lavery, and Par Jason Engle. “Measuring Social Capital: Accounting for Nested Data and Subnetworks Within Schools.” *Social Indicators Research* 126, no. 3 (April 2016): 1189–1207. <https://doi.org/10.1007/s11205-015-0945-2>.
- Cooper, Joy, and Larry Davis. “Exploring Comparative Economic Theories: Human Capital Formation Theory vs Screening Theory.” *Journal of Applied Business & Economics* 19, no. 6 (October 2017): 68–73. <http://e-resources.perpusnas.go.id:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ent&AN=126155423&site=eds-live>.
- Delprato, Marcos, and Kwame Akyeampong. “The Effect of Early Marriage Timing on Women’s and Children’s Health in Sub-Saharan Africa and Southwest Asia.” *Annals of Global Health* 83, no. 3–4 (November 8, 2017): 557. <https://doi.org/10.1016/j.aogh.2017.10.005>.
- Ferreira, Frances J, and Mostafa Azad Kamal. “Community Engagement to End Child Early Forced Marriage – Experiences in Selected South Asian Countries” 4, no. 3 (2017): 20.
- Ganira, Lilian K., Nancy A. Ina, Paul A. Odundo, Joseph Ochieng Akondo, and Boniface Ngaruiya. “Early and Forced Child Marriage on Girls’ Education, in Migori County, Kenya: Constraints, Prospects and Policy.” *World Journal of Education* 5, no. 4 (January 1, 2015): 72–80. <http://e-resources.perpusnas.go.id:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=eric&AN=EJ1158598&site=eds-live>.
- Gbunlee, Carolyn H. “Trust in Transition: How New Principals Develop Trust with Faculty During Their Transition Period.” Central Connecticut State University, 2016.
- Goli, Srinivas, Anu Rammohan, and Deepti Singh. “The Effect of Early Marriages and Early Childbearing on Women’s Nutritional Status in India.” *Maternal and*

- Child Health Journal* 19, no. 8 (August 2015): 1864–80.
<https://doi.org/10.1007/s10995-015-1700-7>.
- Hajihasani, Mehrdad, and Timothy Sim. “Marital Satisfaction among Girls with Early Marriage in Iran: Emotional Intelligence and Religious Orientation.” *International Journal of Adolescence and Youth* 24, no. 3 (July 3, 2019): 297–306.
<https://doi.org/10.1080/02673843.2018.1528167>.
- Hamed, Ahmed F., and Fouad M. A. Yousef. “Prevalence, Health and Social Hazards, and Attitude toward Early Marriage in Ever-Married Women, Sohag, Upper Egypt.” *Journal of the Egyptian Public Health Association* 92, no. 4 (October 2017): 228. <http://e-resources.perpusnas.go.id:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edb&AN=134060429&site=eds-live>.
- Hazm, Ibnu. *Al-Muballa*. Vol. IX. Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, 2010.
- Islam, Md. Akhtarul, and Abdur Rahman. “Age at First Marriage and Fertility in Developing Countries: A Meta Analytical View of 15 Demographic and Health Surveys.” *Clinical Epidemiology and Global Health*, January 2020, S2213398420300269. <https://doi.org/10.1016/j.cegh.2020.01.018>.
- ‘Izzuddîn, Abû Muhammad. *Qawâ'id al-Abkâm Fî Mashâlib al-Anâm*. Vol. I. Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1999.
- Kartikawati, Jamilah Reni. “Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia.” *Jurnal Studi Pemuda* 3, no. 1 (2014).
- Kohno, Ayako, Maznah Dahlui, Nik Daliana Nik Farid, Razitasham Safii, and Takeo Nakayama. “Why Girls Get Married Early in Sarawak, Malaysia - an Exploratory Qualitative Study.” *BMC Women's Health* 20, no. 1 (December 2020): 46. <https://doi.org/10.1186/s12905-020-00911-z>.
- Kuranchie, Alfred, and Hillar Addo. “Differential Parental Social Capital Investment in Children’s Education: Research Evidence.” *African Educational Research Journal* 5, no. 3 (September 1, 2017): 207–14.
- Melissa S. Kearney, and Phillip B. Levine. “Income Inequality, Social Mobility, and the Decision to Drop Out of High School.” *Brookings Papers on Economic Activity*, 2016, 333. <http://e-resources.perpusnas.go.id:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsjsr&AN=edsjsr.43869027&site=eds-live>.
- PLAN, Plan Asia Regional Office, and International Center for Research on Women ICRW. “Asia Child Marriage Initiative : Summary of Research in Bangladesh, India, and Nepal.” New Delhi: Plan Asia Regional Office and International Center for Research on Women (ICRW), 2013.

- Rahayu, Wulansari Dyah, and Heni Wahyuni. "The Influence of Early Marriage on Monetary Poverty in Indonesia." *Journal of Indonesian Economy and Business* 35, no. 1 (2020).
- Rahman, Fauzie, Syahadatina Meitria, Rakhmy Aprillisa, and Heppy Dwiyanita Afika. "Kajian Budaya Remaja Pelaku Pernikahan Dini Di Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan." *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia* 11, no. 2 (2015): 108–17. <http://journal.unhas.ac.id/index.php/mkmi/article/view/540>.
- Raj, Anita, Marissa Salazar, Emma C. Jackson, Natalie Wyss, Katherine A. McClendon, Aarushi Khanna, Yemeserach Belayneh, and Lotus McDougal. "Students and Brides: A Qualitative Analysis of the Relationship between Girls' Education and Early Marriage in Ethiopia and India." *BMC Public Health* 19, no. 1 (December 2019): 19. <https://doi.org/10.1186/s12889-018-6340-6>.
- Richard S. Lazarus. "Hope: An Emotion and a Vital Coping Resource Against Despair." *Social Research* 66, no. 2 (1999): 653. <http://e-resources.perpusnas.go.id:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsjsr&AN=edsjsr.40971343&site=eds-live>.
- Rifiani, Dwi. "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam." *Journal de Jure* 3, no. 2 (December 1, 2011). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v3i2.2144>.
- Sanjaya, Ayling, Moersintowarti B. Narendra, Irwanto, Ahmad Suryawan, Mira Irmawati, and Ferry Efendi. "Early Marriage and Its Relationship with Child Development." *Indian Journal of Public Health Research & Development* 9, no. 9 (2018): 193. <https://doi.org/10.5958/0976-5506.2018.00993.2>.
- Sezgin, Aysen Ufuk, and Raija-Leena Punamäki. "Impacts of Early Marriage and Adolescent Pregnancy on Mental and Somatic Health: The Role of Partner Violence." *Archives of Women's Mental Health*, April 6, 2019. <https://doi.org/10.1007/s00737-019-00960-w>.
- IIB Darmajaya. "Stop Pernikahan Dini, Siapkan Generasi Muda Yang Berencana." Accessed May 10, 2020. <https://www.darmajaya.ac.id/stop-pernikahan-dini-siapkan-generasi-muda-yang-berencana/>.
- Sunaryanto, Heri. "Analisis Sosial-Ekonomi Faktor Penyebab Perkawinan Anak Di Bengkulu: Dalam Perspektif Masyarakat Dan Pemerintah (Studi Kasus Di Kabupaten Seluma)." *Jurnal Sosiologi Nusantara* 5, no. 1 (June 25, 2019): 22–42. <https://doi.org/10.33369/jsn.5.1.22-42>.
- Susanti, Emy. "Women's Knowledge and the Role of Local Female Leaders in Ending the Practice of the Early Marriage of Girls in Rural Communities of Indonesia." *Journal of International Women's Studies : Bridgewater* 20, no. 9 (2019).
- Talukder, Ashis, Muhammad Mahmudul Hasan, Shaharior Rahman Razu, and Md. Zobayer Hossain. "Early Marriage in Bangladesh: A Cross-Sectional Study

- Exploring the Associated Factors.” *Journal of International Women’s Studies* 21, no. 1 (2020).
- Tim. “Kalsel Jadi Provinsi Dengan Jumlah Perkawinan Anak Tertinggi.” nasional. Accessed August 14, 2019. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190308201723-20-375681/kalsel-jadi-provinsi-dengan-jumlah-perkawinan-anak-tertinggi>.
- Topor, Alain, Lisa Skogens, and Ninive von Greiff. “Building Trust and Recovery Capital: The Professionals’ Helpful Practice.” *Advances in Dual Diagnosis* 11, no. 2 (May 21, 2018): 76–87. <https://doi.org/10.1108/ADD-11-2017-0022>.
- Tschannen-Moran, Megan. *Trust Matters: Leadership for Successful Schools*. Second edition. San Francisco: Jossey-Bass, 2014.
- Tschannen-Moran, Megan, and Christopher Gareis. “Principals, Trust, and Cultivating Vibrant Schools.” *Societies* 5, no. 2 (March 27, 2015): 256–76. <https://doi.org/10.3390/soc5020256>.
- UNICEF. *UNICEF Annual Report 2018*. New York: UNICEF, 2019.
- Walker, J. “Early Marriage in Africa - Trends, Harmful Effects and Interventions.” *African Journal of Reproductive Health* 16, no. 2 (n.d.): 231–40.